

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
12-03-2022	19-03 s/d 29-03-2022	18-04-2022	29-04-2022	30-04-2022

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No.2, April 2022 (121-129)

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

Gerakan Sosial Masyarakat Eks Penghuni Lama Gusuran UIN Raden Fatah Kampus B Jakabaring

Nurfitriyanti

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: Nfity312@gmail.com

Nico Oktario Adytyas

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: nico_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

Social movements are increasingly believed to be tools of interest to realize social change when people are faced with social problems (problems). This research is motivated by the social movement of the former residents of the evicted former UIN Raden Fatah Jakabaring where the former community (five business) demand compensation rights for their land and buildings that have been evicted due to the land acquisition of Campus B UIN Raden Fatah in 2015. some people who have land rights and are proven by official certificates in accordance with statutory regulations demand their rights, namely compensation for land and buildings that have been evicted to the provincial government. South Sumatra and UIN Raden Fatah, after deliberation, the results did not find agreement, so the provincial government proposed to the community that the land acquisition case (eviction) was directed to the legal domain of the Palembang city court to find the best solution so that it could be resolved fairly so that no parties who feel aggrieved.

The purpose of the study was to determine the dynamics of the ex-eviction community in the construction of the Raden Fatah Jakabaring UIN building and the form of the ex-community social movement towards the acquisition of eviction land at UIN Jakabaring. The research methodology used is a qualitative method. Narrative-descriptive research with an inductive-deductive approach from the truth of the case to the general public regarding a phenomenon that occurs. research instrument with interview sheets and documentation, data collection techniques through in-depth interviews with parties related to the land dispute case of UIN Raden Fatah.

The results showed that the dynamics of the social movement of the former (five business) residents of the former evicted UIN Raden Fatah Jakabaring, namely

the community worked hard to demand compensation for their land and buildings that had been evicted by submitting the case to the Palembang city court with the assistance of a resident's attorney. namely Herman Iskandar who was represented by Rozaillah et al. With this, the case was won by the former Panca Usaha community with the results of negotiations by Governor Herman Deru to the former community. So that the community is given two choices from the results of the negotiations, namely compensation in the form of an allocation by the governor of South Sumatra, the first choice is the allocation of vacant land in the Jakabaring area and the second option is flats in the Kertapati area. The form of the movement is a resistance movement.

Keywords: Social Movement, Community, Land Dispute

ABSTRAK

Gerakan sosial (social movement) semakin diyakini merupakan alat kepentingan untuk mewujudkan perubahan sosial ketika masyarakat dihindangi problem sosial (Permasalahan). Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh gerakan sosial masyarakat eks penghuni lama gusuran UIN Raden Fatah Jakabaring dimana masyarakat Eks (Panca Usaha) menuntut hak ganti rugi atas lahan dan bangunan mereka yang telah digusur akibat pembebasan lahan Kampus B UIN Raden Fatah pada tahun 2015. Sehingga ada sebagian masyarakat yang memiliki hak lahan dan dibuktikan dengan sertifikat resmi sesuai peraturan perundang-undangan menuntut hak mereka yakni ganti rugi atas lahan dan bangunan yang telah digusur kepada Pemprov. Sumsel dan UIN Raden Fatah, setelah dilakukan musyawarah hal hasil tidak menemukan kesepakatan sehingga Pemprov mengusulkan kepada masyarakat yang terkait kasus pembebasan lahan (gusuran) diarahkan ke ranah hukum pengadilan kota Palembang agar ditemukan solusi terbaik sehingga dapat di selesaikan secara adil agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Dinamika masyarakat Eks Gusuran Pembangunan Gedung UIN Raden Fatah Jakabaring serta Bentuk dari Gerakan Sosial Masyarakat Eks Terhadap Pembebasan Lahan Gusuran UIN Jakabaring. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif jenis penelitian Naratif-deskriptif dengan metode induktif-deduktif pendekatan dari kebenaran kasus ke umum mengenai suatu fenomena yang terjadi. instrument penelitian dengan lembar wawancara dan dokumentasi, Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait kasus sengketa lahan UIN Raden Fatah.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika gerakan sosial masyarakat eks (Panca Usaha) penghuni lama gusuran UIN Raden Fatah Jakabaring yaitu masyarakat berusa keras menuntut hak ganti rugi atas lahan dan bangunan mereka yang telah digusur dengan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan kota Palembang di bantu oleh kuasa hukum warga yakni Herman Iskandar yang di wakili oleh Rozaillah dkk. Dengan ini, perkara tersebut di menangkan oleh masyarakat eks Panca Usaha dengan hasil negoisasi oleh Gubernur Herman Deru kepada masyarakat Eks. Sehingga

masyarakat di berikan dua pilihan dari hasil negoisasi yaitu ganti rugi berupa alokasi oleh gubernur sumatera selatan, pilihan pertama berupa alokasi lahan kosong di daerah Jakabaring serta pilihan yang kedua adalah rumah susun yang berada di daerah kertapati. Adapun bentuk dari gerakannya adalah gerakan perlawanan (Resistensi).

Keywords: *Gerakan social, masyarakat, sengketa lahan*

PENDAHULUAN

Gerakan sosial (social movement) semakin diyakini merupakan alat kepentingan untuk mewujudkan perubahan sosial ketika masyarakat dihinggap problem sosial (Permasalahan). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali menimbulkan masalah polemik dalam pelaksanaan dinamika pembangunan, Sehingga timbul berbagai macam konflik sengketa lahan yang terjadi pada masyarakat akibat pembangunan yang akan dilakukan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali menimbulkan masalah polemik dalam pelaksanaannya. Hambatan yang terjadi karena adanya konflik kepentingan antara hak kepemilikan tanah dan pemilik lahan sehingga aspek hukum dalam proses pembebasan lahan tersebut sering kali di tunggangi oleh pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, Seiring dengan dinamika pembangunan, berbagai macam konflik sengketa juga timbul dalam masyarakat akibat pembangunan tersebut. Salah satu kegiatan pembangunan nasional yakni pembangunan infrastruktur guna kepentingan umum. Salah satu pembangunan yang berbasis untuk kepentingan umum yaitu, pembangunan sarana pendidikan guna memenuhi salah satu hak masyarakat yakni hak atas pendidikan. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dalam hal ini turut andil dalam kegiatan pembangunan nasional sebagai kepentingan umum dalam sarana pendidikan dengan inisiatif membangun kampus B UIN Raden Fatah oleh PT. Nindya Karya diatas pemukiman warga dengan lahan seluas 35 hektare yang dihuni oleh 146 kepala keluarga (KK) di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU 1 jakabaring, Palembang.

Namun pada awalnya Lahan ini diakusisi oleh warga yang bernama Amrozie pemilik lahan selaku pihak ketiga yang telah ia beli dari saudara Yustin selaku pihak kedua yang mana tanah tersebut peroleh dari saudari Yustin dengan cara membeli sebagian lahan dari saudari Ny. Siti Zuhro Saleh selaku pihak pertama sebagaimana diterangkan dalam Akta jual beli Nomor 43/PT/SU-I/1990 dikutip dari (surat putusan Mahkamah Agung Nomor 2334 K/Pdt/2017). pada tahun 2001 saudari Yustin selaku pihak kedua menjual tanah tersebut kepada saudara Amrozie selaku pihak ketiga sehingga terjadilah kesepakatan hak jual beli tanah diatas materai yang di buat dihadapan Robert Tjahjaindra selaku notaris di Palembang pada tahun 2001. namun pada tahun 2008 Amrozie selaku pihak ketiga mulai mengkaplingkan tanah tersebut dan di distribusikan kepada warga dengan harga murah. Pada tahun 2008 mulailah satu

perasatu warga mendirikan bangunan yang telah dibelinya tadi, akan tetapi warga yang membeli tanah ditempat tersebut tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada dasarnya lahan yang berada di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU 1 Jakabaring, Palembang tersebut merupakan lahan hasil reklamasi milik pemerintah Sumatera Selatan yang kemudian dihibahkan kepada UIN Raden Fatah melalui gubernur pada tahun 2012 berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 10 Oktober 2011 No. 715/KPTS/VI/2011 (yang dikutip dari Surat putusan Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Palembang No.28/Pdt.G/2016/PN.Plg:17). Terkait hal tersebut maka beberapa warga yang rumahnya berada diwilayah pembangunan UIN kampus B tidak menerima pembangunan yang akan dilakukan oleh UIN karena belum mendapatkan hak ganti rugi atas penggusuran yang dilakukan oleh pihak UIN terhadap tempat tinggal mereka.

Sehingga tidak ditemukannya kesepakatan atas ganti rugi yang diberikan kepada warga dan tidak ditemukannya solusi bagi warga yang merasa dirugikan, akhirnya masyarakat mengajak massa untuk melakukan gerakan/demonstrasi untuk menuntut dan meminta kejelasan atas ganti rugi yg belum dibayarkan. Lalu mengapa belum ada kejelasan ganti rugi? dan bagaimana dinamika masyarakat eks? serta apa bentuk dari gerakan yang dilakukan masyarakat eks Gusuran Pembangunan Gedung UIN Raden Fatah Jakabaring pada saat pembebasan lahan.dari alasan diatas dapat diketahui bahwa masih adanya hak-hak masyarakat yang kurang terpenuhi. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai dinamika masyarakat Eks gusuran pembangunan gedung UIN Raden Fatah Jakabaring

TINJAUAN LITERATUR

Denny Dewanto Panjaitan dengan judul “Peranan Komnas Ham Dalam Penanganan Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Uin Raden Fatah Palembang ” , dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan Komnas HAM dalam kasus pembebasan lahan pembangunan gedung UIN Raden Fatah Palembang.

Penelitian ini fokus membahas peranan Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) dalam perlindungan HAM serta faktor yang mempengaruhi peranan Komnas HAM dalam pembebasan lahan pembangunan uin rf. Auli Sahdin dengan judul “Gerakan Sosial Dan Sengketa Lahan Di Aceh Singkil(Studi Kasus:Masyarakat Kecamatan Singkil versus PT.Nafasindo)” dalam penelitian ini membahas tentang peran, tantangan, dan dampak/capaian gerakan sosial dalam mengupayakan tuntutannya terkait sengketa lahan antara masyarakat Kecamatan Singkil dan PT.Nafasindo.

Meita Setyorini dengan berjudul : “Gerakan Sosial Kelompok Hitambara Sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan Dalam Kasus Redistribusi Tanah” dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana latar belakang berdirinya kelompok sosial HITAMBARA (himpunan petani masyarakat banjarnegara), tahap pelaksanaan redistribusi tanah dan gerakan sosial sebagai gerakan sosial masyarakat kecamatan punggelan dalam kasus redistribusi tanah. Ahmad Izudin yang berjudul :

“Gerakan Sosial Warga Parangkusumo Pada Kasus Penggusuran Lahan Geo Maritim Park” dalam penelitian jurnal ini fokus membahas kasus penggusuran warga parangkusumo Kabupaten Bantul, menguraikan dinamika gerakann sosial warga yang terkena dampak penggusuran akibat rencana pembangunan Geo Maritim Park. Soni Akhmad Nulhaqim yang berjudul “Upaya Prenvektif Konflik Penggusuran Lahan”.

Dalam jurnal ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggusuran lahan masyarakat dirugikan dan merasa tidak dpat perlindungan karena penggusuran yang dilakukan secara paksaan. Berdasarkan beberapa sumber diatas, yang membedakan tulisan peneliti dengan tulisan sebelumnya ialah penelitian ini memfokuskan pada dinamika yang terjadi serta bentuk dari gerakan sosial masyarakat eks penghuni lama gusuran UIN Raden Fatah Jakabaring, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Syahza, 2021:28). Pendekatan kualitatif ini juga bertujuan membuat deskriptif secara sistematis, bertujuan untuk mengetahui kebenaran kasus ke umum mengenai suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Untuk menganalisa data peneliti menggunakan teknis analisis Naratif-Deskriptif, yaitu memperkuat analisa dengan kualitas bahan yang diperoleh, bahan yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode induktif-deduktif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dan juga setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika yang terjadi pada saat pembebasan lahan membuat pihak masyarakat eks (Panca Usaha) merasa dirugikan sehingga masyarakat tersebut menuntut hak mereka. Dengan cara membuat gerakan sosial guna mencari titik temu dan keterangan akan hak ganti rugi. Sehingga pada saat terjadi gerakan masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk melakukan demonstrasi (gerakan).

Menurut pandangan ahli sosiologi dalam kamus sosiologi memberikan definisi bahwa gerakan sosial merupakan suatu aliansi sosial sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat sehingga perubahan yang dilakukan oleh masyarakat eks merupakan suatu perubahan yang dapat dilakukan untuk mencari titik terang (kejelasan) akan ganti

rugi lahan mereka. Kejadian yang terjadi pada kasus permasalahan sengketa lahan ini memicu unsur perlawanan.

Kejadian ini sejalan dengan pendapat Tarrow, secara teknis bahwa masyarakat eks (Panca Usaha) merupakan gerakan perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh untuk menggalang kekuatan melawan para elit pemegang otoritas, kekuasaan. Sehingga dari hasil musyawarah kejadian ini diarahkan ke ranah pengadilan untuk mencari titik terang akan keputusan hak ganti rugi lahan tersebut.

Dinamika yang terjadi pada saat pembebasan lahan membuat berbagai macam kejadian tentu hal ini sejalan dengan teori yang di lontarkan oleh Charles Tilly bahwa dinamika yang terjadi adalah rangkaian aksi perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok (Panca Usaha) yang dirugikan oleh pemegang kekuasaan melalui ragam protes publik (media), termasuk tindakan-tindakan di luar jalur partisipasi politik formal yang diatur oleh ranah hukum dan perundang-undangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen, serta mewakili jumlah massa yang dirugikan. Adapun masyarakat yang memiliki kepentingan memanfaatkan moment untuk mencari keuntungan sehingga banyak hal yang harus dikaji ulang.

Sehingga banyak sekali Dinamika (perubahan) yang dilakukan oleh masyarakat Ek (Panca Usaha) dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang akan dibahas secara mendalam sebagai berikut: Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kasus Pembebasan Lahan Faktor yang menyebabkan pembebasan lahan tersebut, karena Pemprov tidak melakukan pemagaran keliling di lahan yang sekarang menjadi zona pembebasan lahan. Pada Tahun 1991 dimana pada saat itu tanah yang menjadi lahan sengketa tersebut masih lahan gambut atau rawa-rawa masih belum ada yang menghuni lahan tersebut sehingga tahun demi tahun banyak sekali mafia tanah yang mengambil keuntungan hak lahan dan mensertifikatkan lahan tersebut secara Ilegal adapun warga yang mensertifikatkan tanah secara resmi dan legal di mata hukum sehingga pada saat permasalahan terjadi warga tersebut memiliki hak penuh untuk menuntut hak nya tersebut.

Namun kelemahan Pemprov juga pada saat itu tidak adanya dokumen yang valid. Peran Aktor Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Lahan Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UINRF, dan Masyarakat Eks (Panca Usaha) sebagai berikut: 1). Peran Pemerintah Sumatera Selatan adalah dengan memanggil pihak-pihak terkait kasus pembebasan lahan untuk melakukan musyawarah agar tercapainya mufakat, soal hak ganti rugi tersebut serta menyarankan agar ksus ini diusut lebih lanjut di ranah hukum pengadilan Kota Palembang. 2). Peran UIN Raden Fatah adalah memberikan solusi bantuan kepada masyarakat eks yang tidak memiliki sertifikat resmi dan terdampak pembebasan lahan (penggusuran) yang berada di wilayah kampus B. Maka pihak UIN Memberikan bantuan dana berupa uang kerohiman sebesar 6,5 juta per Kepala Keluarga. 3). Peran Masyarakat Eks (Panca Usaha) salah satunya yaitu masyarakat Eks melakukan demonstrasi di lapangan kampus

B UIN Raden Fatah Jakabaring dan menyurati berbagai pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini untuk meminta kejelasan ganti rugi.

Langkah-langkah Hukum Dan Mediasi Yang Di lakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan UIN Raden Fatah Palembang Langkah- langkah hukum yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel terhadap gerakan masyarakat eks Panca Usaha yang melakukan aksi tuntutan sengketa lahan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan musyawarah dengan cara mengundang perwakilan masyarakat eks untuk membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi di lahan UIN RF Jakabaring. 2. Mempunyai Sertifikat atau surat keterangan pembebasan lahan dari gubernur sumatera selatan sebagai alat bukti yang kuat. Sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 3. Bagi masyarakat yang belum meerasa puas akan hasil musyawarah, Pemprov memberi Usul dan saran agar kasus ini segera diselesaikan di jalur hukum Pengadilan Kota Palembang.

Bagi masyarakat yang melakukan gerakan sebaiknya untuk menunggu hasil keputusan secara resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Capaian Penyelesaian Sengketa Antara Pemprov Sumsel, UIN RF dan Masyarakat Panca Usaha Setelah sebagai upaya dan tantangan yang di hadapi oleh Masyarakat Panca Usaha dalam mengupayakan hak-hak mereka yang belum di bayarkan dengan ini Pada tahun 2020 UIN Raden Fatah di berikan oleh Pemerintah Sumatera Selatan melalui BPN Kota Palembang berupa sertifikat hak pakai No 51 untuk jaminan keamanan lahan bahwa memang betul lahan tersebut merupakan lahan hibah dari Pemprov. Sehingga pada tahun yang sama masyarakat di panggil oleh gubernur untuk melakukan Musyawarah sehingga masyarakat di berikan dua pilihan dari hasil negoisasi berupa ganti rugi oleh gubernur sumatera selatan, yaitu pilihan pertama berupa alokasi lahan kosong di daerah Jakabaring serta pilihan yang kedua adalah berupa rumah susun yang berada di daerah kertapati. Bentuk Gerakan Sosial Masyarakat Eks Terhadap Pembebasan Lahan Gusuran UIN Jakabaring Terdapat beberapa bentuk dari gerakan sosial yang di kemukakan oleh Horton & Hunt untuk melakukan tindakan perubahan yang terjadi pada masyarakat eks dalam mengambil tindakan demonstrasi untuk menuntut hak mereka, salah satunya yaitu masyarakat yang merasa kecewa karena diakibatkan oleh suatu permasalahan dan akhirnya memutuskan bahkan secara paksa harus berpindah dari tempat tinggal mereka. Menurut dari kaca mata horton dan Hunt bentuk dari gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat Eks (Panca Usaha) ini merupakan suatu bentuk tindakan perlawanan (Resistensi) apabila muncul suatu permasalahan dikalangan masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan massa. Sehingga massa tersebut melakukan suatu gerakan perubahan untuk mencapai titik terang keinginan yang mereka inginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah dalam penelitian ini dan hasil wawancara yang telah diolah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya Masyarakat Eks (Panca Usaha) melakukan beberapa dinamika (perubahan). Adapun dinamikanya berupa

Demonstrasi kepada Pemprov. Sumsel dan UIN Raden Fatah guna untuk meminta kejelasan ganti rugi lahan dan bangunan mereka akibat gusuran yang telah terjadi pada tahun 2015 di lahan UIN Kampus B pada saat akan dilakukan pembangunan.

Maka dari itu, sebagian Masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak dibuktikan dengan (Sertifikat Resmi) dengan ini, pihak UIN Raden Fatah memberikan bantuan berupa Uang Kerohiman/uang pindah sebesar 6,5 juta Per Kepala Keluarga untuk berpindah dan mencari tempat tinggal yang baru. Adapun sebagian masyarakat Panca Usaha yang memiliki bukti yang kuat sesuai dengan peraturan hukum maka, pihak Pemprov Sumsel mengarahkan masyarakat agar permasalahan ini di naikkan ke jalur hukum. Setelah beberapa tahun menanti hasil akhirnya Pemprov dan UIN menjawab audiensi Masyarakat Eks Panca Usaha Pada tahun 2020.

Sehingga dari hasil musyawarah bersama Gubernur Sumsel pada tahun 2020. Maka, masyarakat di berikan dua pilihan dari hasil negoisasi yaitu berupa ganti rugi oleh gubernur Sumatera Selatan, pilihan pertama berupa alokasi lahan kosong di daerah Jakabaring serta pilihan yang kedua adalah rumah susun yang berada di daerah kertapati. Setelah berbagai upaya yang dilakukan Masyarakat Panca Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Bentuk Gerakan Sosial Masyarakat Eks Terhadap Pembebasan Lahan Gusuran UIN Jakabaring adalah berupa gerakan Resistensi (perlawanan) yang dibentuk secara tidak terstruktur. Karena perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan massa. Sehingga massa tersebut melakukan suatu gerakan perubahan untuk mencapai titik terang keinginan yang mereka inginkan berupa hak ganti rugi atas lahan dan bangunan mereka yang telah digusur akibat pembebasan

DAFTAR PUSTAKA

- Dewanto Panjaitan, Denny. 2017. Skripsi Peranan Komnas Ham Dalam Penanganan Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, Palembang : Universitas Sriwijaya, Indralaya Ogan Ilir.
- Izudin, A., & Suyanto, S. (2019). Gerakan Sosial Warga Parangkusumo Pada Kasus Penggusuran Lahan Geo Maritim Park. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 109-228.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 109-117.
- Sahdin, Auli. 2020. Skripsi Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Singkil versus PT.Nafasindo), Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam.
- Setyorini, Meita. 2020. Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA Sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan Dalam Kasus Redistribusi Tanah, Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Sukmana Oman, 2016. konsep dan Teori Gerakan Sosial, Jawa Timur, Malang.
- Syahza, Almasdi. 2021. Metodologi Penelitian Edisi Revisi 2021, Pekanbaru Riau: UR Press.
- Syawaludin, Muhammad. 2017. Sosiologi Perlawanan Studi Perlawanan Repertoar Petani Di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan, Yogyakarta : Cv Budi Utama.